



**KABUPATEN LUWU UTARA**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 15  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 255  
DITETAPKAN DI MASAMBA TANGGAL 31 DESEMBER 2011**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4479/XII/Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Dan  
BUPATI LUWU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Pendapatan                         | Rp. 663.933.329.990,00                            |
| 2. Belanja<br>(defisit)               | Rp. 693.210.129.886,00<br>Rp. (29.276.799.896,00) |
| 3. Pembiayaan                         |   |
| a. Penerimaan                         | Rp. 29.276.799.896,00                             |
| b. Pengeluaran                        | Rp. 00  |
| Jumlah Pembiayaan neto                | Rp. 00  |
| <b>Sisa lebih pembiayaan anggaran</b> | <b>Rp. 00</b>                                     |

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 37.703.348.346,00
  - b. Dana Perimbangan Rp. 540.913.646.667,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.85.316.334.977,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak daerah Rp. 4.073.930.346,00



- b. Retribusi daerah Rp.27.340.418.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 1.079.000.000,00
  - d. Lain-lain PAD yang sah Rp. 5.210.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 40.147.030.667,00
  - b. Dana alokasi umum Rp. 457.250.496.000,00
  - c. Dana alokasi khusus Rp. 43.516.120.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah Rp. 00
  - b. Dana Darurat Rp. 00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi Dan Pemerintah daerah lainnya Rp. 13.989.446.097,00
  - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 58.628.590.880,00
  - e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Rp. 12.698.298.000,00
  - f. Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 353.034.507.656,00
  - b. Belanja Langsung Rp. 340.175.622.230,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 313.893.139.364,00
  - b. Belanja bunga Rp. 00
  - c. Belanja Subsidi Rp. 25.000.000,00
  - d. Belanja Hibah Rp. 4.168.175.000,00
  - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.358.453.292,00
  - f. Belanja Bagi Hasil Rp. 636.761.000,00
  - g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 32.102.979.000,00
  - h. Belanja Tidak Terduga Rp. 850.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai Rp. 23.141.164.800,00
  - b. Belanja barang dan jasa Rp. 166.657.406.250,00
  - c. Belanja modal Rp. 150.3777.051.180,00

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Rp. 29.276.799.896,00
  - b. Pengeluaran Rp. 00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 29.276.799.896,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan Rp. 00,00
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. 00,00
- c. Pembayaran pokok utang Rp. 00,00
- d. Pemberian pinjaman daerah Rp. 00,00
- e. Dana Bergulir Rp. 00
- f. Pembayaran Kegiatan Lanjutan Rp. 00

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
- 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah;
- 14. Lampiran XIV Neraca Daerah Per 31 Desember 2011.

#### **Pasal 6**

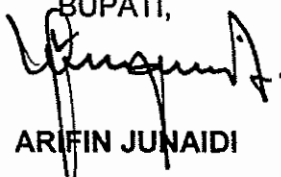
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

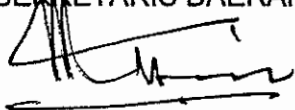
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masamba,  
pada tanggal, 31 Desember 2011

BUPATI,  
  
ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal, 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH



MUDJAHIDIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR : 15



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**

ALAMAT : Jalan Simpursiang No. 26 MASAMBA ■ (0473) 21130

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR 26 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);

18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara  
Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kab. Luwu Utara tanggal 31 Desember  
2011.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA** : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2011 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Untuk teknis pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan  
Bupati.
- KEEMPAT** : Setiap perlakuan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun  
Anggaran 2012 Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dalam keputusan  
ini agar tembusannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Luwu  
Utara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan  
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 31 Desember 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**



Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua Fraksi GOLKAR DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua Fraksi PAN DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua Fraksi HANURA DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua Fraksi PKS DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua Fraksi DEMOKRAT DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Ketua Fraksi PDK DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara

Nomor : 26 Tahun 2011

Tanggal : 31 Desember 2011

Tentang : Persetujuan Atas Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Luwu Utara.

**RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012**

| NOMOR URUT | URAIAN  | ANGGARAN               |                        |                     |         |         |
|------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|---------|---------|
|            |   | SEBELUM PEMBAHASAN     | SETELAH PEMBAHASAN     | BERTAMBAH/BERKURANG |         | %       |
|            |   |                        |                        | Rp.                 | %       |         |
| A          | B   | C                      | D                      | E                   | F       | G       |
| <b>1</b>   | <b>PENDAPATAN</b>   | Rp 657,193,104,541.00  | Rp 663,933,328,990.00  | Rp 6,740,225,449.00 | 1.03%   | 100,00% |
| 1.1        | PENDAPATAN ASLI DAERAH  | Rp 36,902,058,346.00   | Rp 37,703,348,346.00   | Rp 801,290,000.00   | 2.17%   | 5,68%   |
| 1.1.1      | Hasil Pajak Daerah  | Rp 4,017,826,346.00    | Rp 4,073,930,346.00    | Rp 56,104,000.00    | 1.40%   | 0,61%   |
| 1.1.2      | Hasil Retribusi Daerah  | Rp 26,795,232,000.00   | Rp 27,240,418,000.00   | Rp 545,186,000.00   | 2.03%   | 4,12%   |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kelayaan Daerah yang Dipisahkan                 | Rp 1,079,000,000.00    | Rp 1,079,000,000.00    | Rp -                | 0.00%   | 0,16%   |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                         | Rp 5,010,000,000.00    | Rp 5,210,000,000.00    | Rp 200,000,000.00   | 3.99%   | 0,78%   |
| 1.2        | <b>DANA PERIMBANGAN</b>   | Rp 537,373,105,238.00  | Rp 540,913,646,667.00  | Rp 3,540,541,429.00 | 0.66%   | 81,47%  |
| 1.2.1      | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                           | Rp 36,606,489,238.00   | Rp 40,147,030,667.00   | Rp 3,540,541,429.00 | 9.67%   | 6,05%   |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum   | Rp 457,250,496,000.00  | Rp 457,250,496,000.00  | Rp -                | 0.00%   | 68,87%  |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus   | Rp 43,516,120,000.00   | Rp 43,516,120,000.00   | Rp -                | 0.00%   | 6,55%   |
| 1.3        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                       | Rp 82,917,940,957.00   | Rp 85,318,334,977.00   | Rp 2,398,394,020.00 | 2.89%   | 12,85%  |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah  | Rp -                   | Rp -                   | Rp -                | -       | 0,00%   |
| 1.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp 11,591,052,077.00   | Rp 13,989,446,097.00   | Rp 2,398,394,020.00 | 20.69%  | 2,11%   |
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | Rp 58,628,590,880.00   | Rp 58,628,590,880.00   | Rp -                | 0.00%   | 8,83%   |
| 1.3.5      | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya     | Rp 12,698,298,000.00   | Rp 12,698,298,000.00   | Rp -                | 0.00%   | 1,91%   |
| 1.3.6      | Sumbangan Pihak ke III  | Rp -                   | Rp -                   | Rp -                | -       | 0,00%   |
| <b>2</b>   | <b>BELANJA</b>  | Rp 686,469,904,437.00  | Rp 693,210,129,886.00  | Rp 6,740,225,449.00 | 0.98%   | 100,00% |
| 2.1        | BELANJA TIDAK LANGSUNG  | Rp 353,511,118,572.00  | Rp 353,034,507,656.00  | Rp (476,610,916.00) | -0.13%  | 50,93%  |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai   | Rp 314,394,447,880.00  | Rp 313,893,139,364.00  | Rp (501,308,516.00) | -0.16%  | 45,28%  |
| 2.1.4      | Belanja Subsidi   | Rp -                   | Rp 25,000,000.00       | Rp 25,000,000.00    | -       | 0,00%   |
| 2.1.5      | Belanja Hibah   | Rp 2,716,000,000.00    | Rp 4,168,175,000.00    | Rp 1,452,175,000.00 | 53.47%  | 0,60%   |
| 2.1.6      | Belanja Bantuan Sosial  | Rp 2,298,430,692.00    | Rp 1,358,453,292.00    | Rp (939,977,400.00) | -40.90% | 0,20%   |
| 2.1.7      | Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes                | Rp 636,761,000.00      | Rp 636,761,000.00      | Rp -                | 0.00%   | 0,09%   |
| 2.1.8      | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes          | Rp 32,115,479,000.00   | Rp 32,102,979,000.00   | Rp (12,500,000.00)  | -0.04%  | 4,63%   |
| 2.1.9      | Belanja Tidak Terduga   | Rp 1,350,000,000.00    | Rp 850,000,000.00      | Rp (500,000,000.00) | -37.04% | 0,12%   |
| 2.2        | BELANJA LANGSUNG  | Rp 332,958,785,865.00  | Rp 340,175,622,230.00  | Rp 7,216,836,365.00 | 2.17%   | 49,07%  |
|            | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>  | Rp (29,276,799,896.00) | Rp (29,276,799,896.00) | Rp -                | 0.00%   | -       |
| <b>3</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>  | Rp 29,276,799,896.00   | Rp 29,276,799,896.00   | Rp -                | 0.00%   | -       |
| 3.1        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                               | Rp 29,276,799,896.00   | Rp 29,276,799,896.00   | Rp -                | 0.00%   | -       |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya         | Rp 29,276,799,896.00   | Rp 29,276,799,896.00   | Rp -                | 0.00%   | -       |
| 3.1.5      | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                             | Rp -                   | Rp -                   | Rp -                | -       | -       |
| 3.1.6      | Penerimaan Piutang Daerah   | Rp -                   | Rp -                   | Rp -                | -       | -       |
| 3.2        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                              | Rp -                   | Rp -                   | Rp -                | -       | -       |
| 3.2.2      | Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                    | Rp -                   | Rp -                   | Rp -                | -       | -       |
| 3.2.3      | Pembayaran Pokok Utang  | Rp -                   | Rp -                   | Rp -                | -       | -       |
| 3.2.5      | Pinjaman Dana/Modal Bergulir                                      | Rp -                   | Rp -                   | Rp -                | -       | -       |
| 3.2.6      | Pembayaran Kegiatan Lanjutan                                      | Rp -                   | Rp -                   | Rp -                | -       | -       |
|            | <b>SISA LERIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN</b>              | Rp -                   | Rp -                   | Rp -                | -       | -       |

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU UTARA





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2012

| NOMOR URUT | URAIAN  | JUMLAH              |
|------------|---|---------------------|
| 1          | 2   | 3                   |
| 1          | <b>PENDAPATAN</b>   | 663.933.329.990,00  |
| 1.1        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>   | 37.703.348.346,00   |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah   | 4.073.930.346,00    |
| 1.1.2      | Hasil Retribusi Daerah  | 27.340.418.000,00   |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                             | 1.079.000.000,00    |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                     | 5.210.000.000,00    |
| 1.2        | <b>DANA PERIMBANGAN</b>   | 540.913.646.667,00  |
| 1.2.1      | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                       | 40.147.030.667,00   |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum   | 457.250.496.000,00  |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus   | 43.516.120.000,00   |
| 1.3        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                   | 85.316.334.977,00   |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah  | 0,00                |
| 1.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya             | 13.989.446.097,00   |
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   | 58.628.590.880,00   |
| 1.3.5      | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya                 | 12.698.298.000,00   |
| 1.3.6      | Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)  | 0,00                |
| 2          | <b>BELANJA</b>  | 693.210.129.886,00  |
| 2.1        | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>   | 353.034.507.656,00  |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai   | 313.893.139.364,00  |
| 2.1.3      | Belanja Subsidi   | 25.000.000,00       |
| 2.1.4      | Belanja Hibah   | 4.168.175.000,00    |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial  | 1.358.453.292,00    |
| 2.1.6      | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa         | 636.761.000,00      |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 32.102.979.000,00   |
| 2.1.8      | Belanja Tidak Terduga   | 850.000.000,00      |
| 2.2        | <b>BELANJA LANGSUNG</b>   | 340.175.622.230,00  |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai   | 23.141.164.800,00   |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa   | 166.657.406.250,00  |
| 2.2.3      | Belanja Modal   | 150.377.051.180,00  |
|            | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>  | (29.276.799.896,00) |
| 3          | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>  |                     |
| 3.1        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>   | 29.276.799.896,00   |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya                     | 29.276.799.896,00   |
| 3.1.4      | Penerimaan Pinjaman Daerah  | 0,00                |
| 3.1.6      | Penerimaan Piutang Daerah   | 0,00                |
| 3.2        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>  | 0,00                |
| 3.2.2      | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                                | 0,00                |
| 3.2.5      | Pinjaman Dana Bergulir  | 0,00                |
| 3.2.6      | Pembayaran Kegiatan Lanjutan  | 0,00                |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>   | 29.276.799.896,00   |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>                         | 0,00                |

MASAMBA, 31 Desember 2011

**BUPATI LUWU UTARA**

**ARIFIN JUNAIDI**





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
 TAHUN ANGGARAN 2012

| KODE         | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                  | PENDAPATAN         | BELANJA            |                    |                    | JUMLAH BELANJA |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|              |   |                    | TIDAK LANGSUNG     | 4                  | 5                  |                |
| 1            | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |                |
| 1.01         | Urusan Wajib Pendidikan                     | 662.387.279.990,00 | 340.667.229.156,00 | 306.570.412.130,00 | 647.237.641.286,00 |                |
| 1.01.1.01.01 | Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda      | 0,00               | 165.751.278.964,00 | 91.323.457.500,00  | 257.074.736.464,00 |                |
| 1.01.1.01.02 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah        | 0,00               | 165.031.637.964,00 | 90.202.030.000,00  | 255.233.667.964,00 |                |
| 1.02         | Kesehatan                                   | 0,00               | 719.641.000,00     | 1.121.427.500,00   | 1.841.068.500,00   |                |
| 1.02.1.02.01 | Dinas Kesehatan                             | 23.141.000.000,00  | 40.100.215.000,00  | 47.629.500.000,00  | 87.729.715.000,00  |                |
| 1.02.1.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah A. Djemma Masamba   | 1.841.000.000,00   | 24.573.165.000,00  | 17.629.500.000,00  | 42.202.665.000,00  |                |
| 1.03         | Pekerjaan Umum                              | 21.300.000.000,00  | 15.527.050.000,00  | 30.000.000.000,00  | 45.527.050.000,00  |                |
| 1.03.1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum                        | 800.000.000,00     | 5.906.451.000,00   | 60.231.589.230,00  | 66.138.040.230,00  |                |
| 1.03.1.06.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        | 800.000.000,00     | 5.906.451.000,00   | 59.869.954.230,00  | 65.776.405.230,00  |                |
| 1.03.1.20.03 | Sekretariat Daerah                          | 0,00               | 0,00               | 75.000.000,00      | 75.000.000,00      |                |
| 1.04         | Perumahan                                   | 0,00               | 0,00               | 286.635.000,00     | 286.635.000,00     |                |
| 1.04.1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum                        | 0,00               | 0,00               | 2.163.277.000,00   | 2.163.277.000,00   |                |
| 1.04.1.06.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        | 0,00               | 0,00               | 1.445.542.000,00   | 1.445.542.000,00   |                |
| 1.04.1.13.01 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0,00               | 0,00               | 50.000.000,00      | 50.000.000,00      |                |
| 1.04.1.13.02 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah         | 0,00               | 0,00               | 201.215.000,00     | 201.215.000,00     |                |
| 1.05         | Penataan Ruang                              | 0,00               | 0,00               | 466.520.000,00     | 466.520.000,00     |                |
| 1.05.1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum                        | 0,00               | 0,00               | 1.614.375.000,00   | 1.614.375.000,00   |                |
| 1.05.1.06.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        | 0,00               | 0,00               | 919.375.000,00     | 919.375.000,00     |                |
| 1.06         | Perencanaan Pembangunan                     | 0,00               | 2.472.220.000,00   | 695.000.000,00     | 695.000.000,00     |                |
| 1.06.1.06.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        | 0,00               | 2.472.220.000,00   | 5.071.315.000,00   | 7.543.535.000,00   |                |
| 1.06.1.13.02 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah         | 0,00               | 0,00               | 4.469.750.000,00   | 6.941.970.000,00   |                |
| 1.06.1.20.03 | Sekretariat Daerah                          | 0,00               | 0,00               | 108.065.000,00     | 108.065.000,00     |                |
| 1.07         | Perhubungan                                 | 350.000.000,00     | 2.652.785.275,00   | 493.500.000,00     | 493.500.000,00     |                |
| 1.07.1.07.01 | Dinas Perhubungan                           | 350.000.000,00     | 2.652.785.275,00   | 3.100.000.000,00   | 5.752.785.275,00   |                |
| 1.08         | Lingkungan Hidup                            | 0,00               | 883.925.000,00     | 3.100.000.000,00   | 5.752.785.275,00   |                |
| 1.08.1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum                        | 0,00               | 0,00               | 5.782.910.000,00   | 6.666.835.000,00   |                |
|              |   |                    |                    | 3.382.910.000,00   | 3.382.910.000,00   |                |


| KODE         | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   | PENDAPATAN         | BELANJA           |                   |                    | JUMLAH BELANJA |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|              |  |                    | TIDAK LANGSUNG    | LANGSUNG          | 6                  |                |
|              |  |                    |                   |                   |                    |                |
| 1            | 2  |                    |                   |                   |                    |                |
| 1.08.1.08.01 | Kantor Lingkungan Hidup  | 0,00               | 883.925.000,00    | 2.400.000.000,00  | 3.283.925.000,00   |                |
| 1.09         | <b>Pertanahan</b>  | 0,00               | 0,00              | 5.467.400.000,00  | 5.467.400.000,00   |                |
| 1.09.1.20.03 | Sekretariat Daerah   | 0,00               | 0,00              | 5.467.400.000,00  | 5.467.400.000,00   |                |
| 1.10         | <b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>  | 525.000.000,00     | 2.550.536.500,00  | 2.500.000.000,00  | 5.050.536.500,00   |                |
| 1.10.1.10.01 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil   | 525.000.000,00     | 2.550.536.500,00  | 2.500.000.000,00  | 5.050.536.500,00   |                |
| 1.11         | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>                                | 0,00               | 3.923.511.000,00  | 719.399.070,00    | 4.642.910.070,00   |                |
| 1.11.1.11.01 | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan                                | 0,00               | 3.923.511.000,00  | 719.399.070,00    | 4.642.910.070,00   |                |
| 1.12         | <b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>                                   | 0,00               | 0,00              | 2.080.600.930,00  | 2.080.600.930,00   |                |
| 1.12.1.11.01 | Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan                                | 0,00               | 0,00              | 2.080.600.930,00  | 2.080.600.930,00   |                |
| 1.13         | <b>Sosial</b>  | 0,00               | 5.697.161.000,00  | 5.332.199.000,00  | 11.029.360.000,00  |                |
| 1.13.1.13.01 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 0,00               | 3.420.588.000,00  | 3.136.309.000,00  | 6.556.897.000,00   |                |
| 1.13.1.13.02 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 0,00               | 2.276.573.000,00  | 2.195.890.000,00  | 4.472.463.000,00   |                |
| 1.14         | <b>Ketenagakerjaan</b>   | 25.000.000,00      | 1.290.194.000,00  | 2.178.746.000,00  | 3.468.940.000,00   |                |
| 1.14.1.13.01 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 0,00               | 0,00              | 554.146.000,00    | 554.146.000,00     |                |
| 1.14.1.14.01 | Kantor Latihan Kerja   | 25.000.000,00      | 1.290.194.000,00  | 1.624.600.000,00  | 2.914.794.000,00   |                |
| 1.15         | <b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>   | 0,00               | 2.569.988.000,00  | 1.473.872.000,00  | 4.043.860.000,00   |                |
| 1.15.1.15.01 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan                                      | 0,00               | 2.569.988.000,00  | 1.473.872.000,00  | 4.043.860.000,00   |                |
| 1.16         | <b>Penanaman Modal</b>   | 0,00               | 0,00              | 505.000.000,00    | 505.000.000,00     |                |
| 1.16.1.06.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | 0,00               | 0,00              | 375.000.000,00    | 375.000.000,00     |                |
| 1.16.1.20.03 | Sekretariat Daerah   | 0,00               | 0,00              | 130.000.000,00    | 130.000.000,00     |                |
| 1.17         | <b>Kebudayaan</b>  | 0,00               | 0,00              | 1.137.120.000,00  | 1.137.120.000,00   |                |
| 1.17.1.25.01 | Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata                           | 0,00               | 0,00              | 1.137.120.000,00  | 1.137.120.000,00   |                |
| 1.18         | <b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>  | 0,00               | 0,00              | 2.627.970.000,00  | 2.627.970.000,00   |                |
| 1.18.1.01.01 | Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda   | 0,00               | 0,00              | 2.627.970.000,00  | 2.627.970.000,00   |                |
| 1.19         | <b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>                                    | 0,00               | 4.356.347.000,00  | 4.292.525.000,00  | 8.648.872.000,00   |                |
| 1.19.1.13.02 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 0,00               | 0,00              | 729.525.000,00    | 729.525.000,00     |                |
| 1.19.1.19.01 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat                         | 0,00               | 1.365.262.000,00  | 1.863.000.000,00  | 3.228.262.000,00   |                |
| 1.19.1.19.02 | Satuan Polisi Pamong Praja   | 0,00               | 2.991.085.000,00  | 1.700.000.000,00  | 4.691.085.000,00   |                |
| 1.20         | <b>Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, &amp; Persandian</b> | 637.296.279.990,00 | 90.313.564.417,00 | 49.361.660.000,00 | 139.675.224.417,00 |                |
| 1.20.1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum   | 0,00               | 0,00              | 60.000.000,00     | 60.000.000,00      |                |
| 1.20.1.20.01 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)  | 0,00               | 5.523.044.000,00  | 0,00              | 5.523.044.000,00   |                |
| 1.20.1.20.02 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  | 0,00               | 487.166.000,00    | 0,00              | 487.166.000,00     |                |
| 1.20.1.20.03 | Sekretariat Daerah   | 500.000.000,00     | 9.550.016.000,00  | 16.119.425.000,00 | 25.669.441.000,00  |                |

| KODE         | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                               | PENDAPATAN         | BELANJA           |                   |                   | JUMLAH BELANJA |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              |  |                    | TIDAK LANGSUNG    | LANGSUNG          |                   |                |
| 1            | 2  | 3                  | 4                 | 5                 | 6                 |                |
| 1.20.1.20.04 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah               | 0,00               | 2.732.091.000,00  | 11.200.000.000,00 | 13.932.091.000,00 |                |
| 1.20.1.20.05 | Inspektorat Kabupaten                                    | 0,00               | 2.412.840.000,00  | 2.740.000.000,00  | 5.152.840.000,00  |                |
| 1.20.1.20.06 | Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah                        | 636.231.691.990,00 | 51.507.872.092,00 | 9.876.080.000,00  | 61.383.952.092,00 |                |
| 1.20.1.20.07 | Badan Kepegawalan Daerah dan Diklat                      | 0,00               | 2.081.334.000,00  | 4.716.000.000,00  | 6.797.334.000,00  |                |
| 1.20.1.20.09 | Pemerintah Kecamatan Sabbang                             | 100.000.000,00     | 1.637.493.750,00  | 369.500.000,00    | 2.006.993.750,00  |                |
| 1.20.1.20.10 | Pemerintah Kecamatan Baebunta                            | 15.000.000,00      | 1.827.070.725,00  | 357.500.000,00    | 2.184.570.725,00  |                |
| 1.20.1.20.11 | Pemerintah Kecamatan Limbong                             | 1.350.000,00       | 949.370.500,00    | 317.500.000,00    | 1.266.870.500,00  |                |
| 1.20.1.20.12 | Pemerintah Kecamatan Seko                                | 1.720.000,00       | 1.033.194.000,00  | 357.500.000,00    | 1.390.694.000,00  |                |
| 1.20.1.20.13 | Pemerintah Kecamatan Rampi                               | 500.000,00         | 608.443.000,00    | 257.500.000,00    | 865.943.000,00    |                |
| 1.20.1.20.14 | Pemerintah Kecamatan Malangke                            | 7.000.000,00       | 1.196.663.500,00  | 307.500.000,00    | 1.504.163.500,00  |                |
| 1.20.1.20.15 | Pemerintah Kecamatan Malangke Barat                      | 11.458.000,00      | 1.069.101.900,00  | 319.500.000,00    | 1.388.601.900,00  |                |
| 1.20.1.20.16 | Pemerintah Kecamatan Masamba                             | 156.560.000,00     | 2.791.379.250,00  | 443.500.000,00    | 3.234.879.250,00  |                |
| 1.20.1.20.17 | Pemerintah Kecamatan Mappedeceng                         | 30.000.000,00      | 1.023.644.000,00  | 369.500.000,00    | 1.393.144.000,00  |                |
| 1.20.1.20.18 | Pemerintah Kecamatan Bone-Bone                           | 135.000.000,00     | 1.622.113.500,00  | 369.500.000,00    | 1.991.613.500,00  |                |
| 1.20.1.20.19 | Pemerintah Kecamatan Sukamaju                            | 106.000.000,00     | 1.502.727.200,00  | 375.500.000,00    | 1.878.227.200,00  |                |
| 1.20.1.20.20 | Pemerintah Kelurahan Kappuna                             | 0,00               | 116.600.000,00    | 95.000.000,00     | 211.600.000,00    |                |
| 1.20.1.20.21 | Pemerintah Kelurahan Bone                                | 0,00               | 108.000.000,00    | 95.000.000,00     | 203.000.000,00    |                |
| 1.20.1.20.22 | Pemerintah Kelurahan Kasimbong                           | 0,00               | 109.200.000,00    | 95.000.000,00     | 204.200.000,00    |                |
| 1.20.1.20.23 | Pemerintah Kelurahan Ballase                             | 0,00               | 121.800.000,00    | 95.000.000,00     | 216.800.000,00    |                |
| 1.20.1.20.24 | Pemerintah Kelurahan Marobo                              | 0,00               | 100.800.000,00    | 100.000.000,00    | 200.800.000,00    |                |
| 1.20.1.20.25 | Pemerintah Kelurahan Salassa                             | 0,00               | 100.800.000,00    | 100.000.000,00    | 200.800.000,00    |                |
| 1.20.1.20.26 | Pemerintah Kelurahan Bone-Bone                           | 0,00               | 100.800.000,00    | 115.000.000,00    | 215.800.000,00    |                |
| 1.20.2.01.01 | Dinas Pertanian  | 0,00               | 0,00              | 12.500.000,00     | 12.500.000,00     |                |
| 1.20.2.02.01 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan                           | 0,00               | 0,00              | 98.155.000,00     | 98.155.000,00     |                |
| 1.21         | <b>Ketahanan Pangan</b>                                  | 0,00               | 8.164.714.000,00  | 5.977.953.900,00  | 14.142.667.900,00 |                |
| 1.21.1.21.01 | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan          | 0,00               | 8.164.714.000,00  | 4.109.793.900,00  | 12.274.507.900,00 |                |
| 1.21.2.01.01 | Dinas Pertanian  | 0,00               | 0,00              | 1.868.160.000,00  | 1.868.160.000,00  |                |
| 1.22         | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                  | 0,00               | 1.840.994.000,00  | 2.750.000.000,00  | 4.590.994.000,00  |                |
| 1.22.1.22.01 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa      | 0,00               | 1.840.994.000,00  | 2.750.000.000,00  | 4.590.994.000,00  |                |
| 1.23         | <b>Statistik</b>   | 0,00               | 0,00              | 405.250.000,00    | 405.250.000,00    |                |
| 1.23.1.06.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                     | 0,00               | 0,00              | 405.250.000,00    | 405.250.000,00    |                |
| 1.24         | <b>Kearsipan</b>   | 0,00               | 0,00              | 78.572.500,00     | 78.572.500,00     |                |
| 1.24.1.01.02 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah                     | 0,00               | 0,00              | 78.572.500,00     | 78.572.500,00     |                |
| 1.25         | <b>Komunikasi dan Informatika</b>                        | 250.000.000,00     | 2.193.344.000,00  | 2.765.720.000,00  | 4.959.064.000,00  |                |
| 1.25.1.20.03 | Sekretariat Daerah                                       | 0,00               | 0,00              | 640.040.000,00    | 640.040.000,00    |                |
| 1.25.1.25.01 | Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata | 250.000.000,00     | 2.193.344.000,00  | 2.125.680.000,00  | 4.319.024.000,00  |                |
| 2            | <b>Urusan Pilihan</b>                                    | 1.546.050.000,00   | 12.367.278.500,00 | 33.605.210.100,00 | 45.972.488.600,00 |                |

| KODE         | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   | PENDAPATAN         | TIDAK LANGSUNG      |                    | LANGSUNG           |   | JUMLAH BELANJA |
|--------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---|----------------|
|              |  |                    | 3                   | 4                  | 5                  | 6 |                |
| 1            | 2  |                    |                     |                    |                    |   |                |
| 2.01         | <b>Pertanian</b>   | 126.000.000,00     | 3.914.908.000,00    | 14.226.546.850,00  | 18.141.454.850,00  |   |                |
| 2.01.1.14.01 | Kantor Lathian Kerja   | 0,00               | 0,00                | 75.400.000,00      | 75.400.000,00      |   |                |
| 2.01.1.21.01 | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan                                    | 0,00               | 0,00                | 1.014.206.100,00   | 1.014.206.100,00   |   |                |
| 2.01.2.01.01 | Dinas Pertanian  | 126.000.000,00     | 3.914.908.000,00    | 10.033.340.000,00  | 13.948.248.000,00  |   |                |
| 2.01.2.02.01 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan   | 0,00               | 0,00                | 3.103.600.750,00   | 3.103.600.750,00   |   |                |
| 2.02         | <b>Kehutanan</b>   | 1.400.050.000,00   | 4.347.033.500,00    | 3.898.244.250,00   | 8.245.277.750,00   |   |                |
| 2.02.2.02.01 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan   | 1.400.050.000,00   | 4.347.033.500,00    | 3.898.244.250,00   | 8.245.277.750,00   |   |                |
| 2.03         | <b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>   | 0,00               | 1.734.362.000,00    | 2.770.000.000,00   | 4.504.362.000,00   |   |                |
| 2.03.2.03.01 | Dinas Pertambangan dan Energi  | 0,00               | 1.734.362.000,00    | 2.770.000.000,00   | 4.504.362.000,00   |   |                |
| 2.04         | <b>Pariwisata</b>  | 0,00               | 0,00                | 337.200.000,00     | 337.200.000,00     |   |                |
| 2.04.1.25.01 | Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata                           | 0,00               | 0,00                | 337.200.000,00     | 337.200.000,00     |   |                |
| 2.05         | <b>Kelautan dan Perikanan</b>  | 20.000.000,00      | 2.370.975.000,00    | 11.055.000.000,00  | 13.425.975.000,00  |   |                |
| 2.05.2.05.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan   | 20.000.000,00      | 2.370.975.000,00    | 11.055.000.000,00  | 13.425.975.000,00  |   |                |
| 2.06         | <b>Perdagangan</b>   | 0,00               | 0,00                | 491.500.000,00     | 491.500.000,00     |   |                |
| 2.06.1.15.01 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan                                      | 0,00               | 0,00                | 491.500.000,00     | 491.500.000,00     |   |                |
| 2.07         | <b>Perindustrian</b>   | 0,00               | 0,00                | 534.628.000,00     | 534.628.000,00     |   |                |
| 2.07.1.15.01 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan                                      | 0,00               | 0,00                | 534.628.000,00     | 534.628.000,00     |   |                |
| 2.08         | <b>Transmigrasi</b>  | 0,00               | 0,00                | 292.091.000,00     | 292.091.000,00     |   |                |
| 2.08.1.13.01 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 0,00               | 0,00                | 292.091.000,00     | 292.091.000,00     |   |                |
|              | <b>JUMLAH</b>  | 663.933.329.990,00 | 353.034.507.656,00  | 340.175.622.230,00 | 693.210.129.886,00 |   |                |
|              | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>   |                    | (29.276.799.896,00) |                    |                    |   |                |
|              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>  |                    |                     |                    |                    |   |                |
| 1            | 2  |                    |                     |                    |                    |   |                |
| 1            | <b>Urusan Wajib</b>  |                    |                     |                    |                    |   |                |
| 1.20         | <b>Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, &amp; Persandian</b> | 29.276.799.896,00  | 0,00                | 29.276.799.896,00  |                    |   |                |
| 1.20.1.20.06 | Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah  | 29.276.799.896,00  | 0,00                | 29.276.799.896,00  |                    |   |                |
|              | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN</b>                     |                    |                     |                    | 0,00               |   |                |




MASAMBA, 31 Desember 2011  
BUPATI LUWU UTARA



ARIFIN JUNAIDI

MASAMBA, 31 Desember 2011  
BUPATI LUWU UTARA



ARIFIN JUNAIDI



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2012

| KODE    | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  | PENDAPATAN        | BELANJA            |                   |                    |
|---------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|         |  |                   | TIDAK LANGSUNG     | LANGSUNG          | JUMLAH BELANJA     |
| 1       | 2  | 3                 | 4                  | 5                 | 6                  |
| 1.01.01 | Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda   | 0,00              | 165.031.637.964,00 | 92.830.000.000,00 | 257.861.637.964,00 |
| 1.01.18 | Urusan Wajib Pendidikan  | 0,00              | 165.031.637.964,00 | 90.202.030.000,00 | 255.233.667.964,00 |
| 1.01.02 | Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga  | 0,00              | 0,00               | 2.627.970.000,00  | 2.627.970.000,00   |
| 1.01.01 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah   | 0,00              | 719.641.000,00     | 1.200.000.000,00  | 1.919.641.000,00   |
| 1.01.24 | Urusan Wajib Pendidikan  | 0,00              | 719.641.000,00     | 1.121.427.500,00  | 1.841.068.500,00   |
| 1.02.01 | Urusan Wajib Kearsipan   | 0,00              | 0,00               | 78.572.500,00     | 78.572.500,00      |
| 1.02.01 | Dinas Kesehatan  | 1.841.000.000,00  | 24.573.165.000,00  | 17.629.500.000,00 | 42.202.665.000,00  |
| 1.02.02 | Urusan Wajib Kesehatan   | 1.841.000.000,00  | 24.573.165.000,00  | 17.629.500.000,00 | 42.202.665.000,00  |
| 1.03.01 | Rumah Sakit Umum Daerah A. Djemma Masamba  | 21.300.000.000,00 | 15.527.050.000,00  | 30.000.000.000,00 | 45.527.050.000,00  |
| 1.03.01 | Urusan Wajib Kesehatan   | 21.300.000.000,00 | 15.527.050.000,00  | 30.000.000.000,00 | 45.527.050.000,00  |
| 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum   | 800.000.000,00    | 5.906.451.000,00   | 65.677.781.230,00 | 71.584.232.230,00  |
| 1.03.04 | Urusan Wajib Pekerjaan Umum  | 800.000.000,00    | 5.906.451.000,00   | 59.869.954.230,00 | 65.776.405.230,00  |
| 1.03.05 | Urusan Wajib Perumahan   | 0,00              | 0,00               | 1.445.542.000,00  | 1.445.542.000,00   |
| 1.03.08 | Urusan Wajib Penataan Ruang  | 0,00              | 0,00               | 919.375.000,00    | 919.375.000,00     |
| 1.03.20 | Urusan Wajib Lingkungan Hidup  | 0,00              | 0,00               | 3.382.910.000,00  | 3.382.910.000,00   |
| 1.06.01 | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 0,00              | 0,00               | 60.000.000,00     | 60.000.000,00      |
| 1.06.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | 0,00              | 2.472.220.000,00   | 6.070.000.000,00  | 8.542.220.000,00   |
| 1.06.03 | Urusan Wajib Pekerjaan Umum  | 0,00              | 0,00               | 75.000.000,00     | 75.000.000,00      |
| 1.06.04 | Urusan Wajib Perumahan   | 0,00              | 0,00               | 50.000.000,00     | 50.000.000,00      |
| 1.06.05 | Urusan Wajib Penataan Ruang  | 0,00              | 0,00               | 695.000.000,00    | 695.000.000,00     |
| 1.06.16 | Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan   | 0,00              | 2.472.220.000,00   | 4.469.750.000,00  | 6.941.970.000,00   |
| 1.06.23 | Urusan Wajib Penanaman Modal   | 0,00              | 0,00               | 375.000.000,00    | 375.000.000,00     |
| 1.07.01 | Urusan Wajib Statistik   | 0,00              | 0,00               | 405.250.000,00    | 405.250.000,00     |
| 1.07.01 | Dinas Perhubungan  | 350.000.000,00    | 2.652.785.275,00   | 3.100.000.000,00  | 5.752.785.275,00   |
| 1.07.01 | Urusan Wajib Perhubungan   | 350.000.000,00    | 2.652.785.275,00   | 3.100.000.000,00  | 5.752.785.275,00   |

| KODE    | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  | PENDAPATAN     | BELANJA          |                  |                  | JUMLAH BELANJA   |
|---------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         |  |                | TIDAK LANGSUNG   | LANGSUNG         | 5                |                  |
| 1       | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                | 6                |
| 1.08.01 | <b>Kantor Lingkungan Hidup</b>   | 0,00           | 883.925.000,00   | 2.400.000.000,00 | 3.283.925.000,00 | 3.283.925.000,00 |
| 1.10.01 | Urusan Wajib Lingkungan Hidup  | 0,00           | 883.925.000,00   | 2.400.000.000,00 | 3.283.925.000,00 | 3.283.925.000,00 |
| 1.10.01 | <b>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>  | 525.000.000,00 | 2.550.536.500,00 | 2.500.000.000,00 | 5.050.536.500,00 | 5.050.536.500,00 |
| 1.10.01 | Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil  | 525.000.000,00 | 2.550.536.500,00 | 2.500.000.000,00 | 5.050.536.500,00 | 5.050.536.500,00 |
| 1.11.01 | <b>Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan</b>                           | 0,00           | 3.923.511.000,00 | 2.800.000.000,00 | 6.723.511.000,00 | 6.723.511.000,00 |
| 1.11    | Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                            | 0,00           | 3.923.511.000,00 | 2.800.000.000,00 | 6.723.511.000,00 | 6.723.511.000,00 |
| 1.12    | Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera                               | 0,00           | 0,00             | 2.080.600.930,00 | 2.080.600.930,00 | 2.080.600.930,00 |
| 1.13.01 | <b>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>                                   | 0,00           | 3.420.588.000,00 | 4.183.761.000,00 | 7.604.349.000,00 | 7.604.349.000,00 |
| 1.04    | Urusan Wajib Perumahan   | 0,00           | 0,00             | 201.215.000,00   | 201.215.000,00   | 201.215.000,00   |
| 1.13    | Urusan Wajib Sosial  | 0,00           | 3.420.588.000,00 | 3.136.309.000,00 | 6.556.897.000,00 | 6.556.897.000,00 |
| 1.14    | Urusan Wajib Ketenagakerjaan   | 0,00           | 0,00             | 554.146.000,00   | 554.146.000,00   | 554.146.000,00   |
| 2.08    | Urusan Pilihan Transmigrasi  | 0,00           | 0,00             | 292.091.000,00   | 292.091.000,00   | 292.091.000,00   |
| 1.13.02 | <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>   | 0,00           | 2.276.573.000,00 | 3.500.000.000,00 | 5.776.573.000,00 | 5.776.573.000,00 |
| 1.04    | Urusan Wajib Perumahan   | 0,00           | 0,00             | 466.520.000,00   | 466.520.000,00   | 466.520.000,00   |
| 1.06    | Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan   | 0,00           | 0,00             | 108.065.000,00   | 108.065.000,00   | 108.065.000,00   |
| 1.13    | Urusan Wajib Sosial  | 0,00           | 2.276.573.000,00 | 2.195.890.000,00 | 4.472.463.000,00 | 4.472.463.000,00 |
| 1.19    | Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri                                | 0,00           | 0,00             | 729.525.000,00   | 729.525.000,00   | 729.525.000,00   |
| 1.14.01 | <b>Kantor Lathhan Kerja</b>  | 25.000.000,00  | 1.290.194.000,00 | 1.700.000.000,00 | 2.990.194.000,00 | 2.990.194.000,00 |
| 1.14    | Urusan Wajib Ketenagakerjaan   | 25.000.000,00  | 1.290.194.000,00 | 1.624.600.000,00 | 2.914.794.000,00 | 2.914.794.000,00 |
| 2.01    | Urusan Pilihan Pertanian   | 0,00           | 0,00             | 75.400.000,00    | 75.400.000,00    | 75.400.000,00    |
| 1.15.01 | <b>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</b>                                 | 0,00           | 2.569.988.000,00 | 2.500.000.000,00 | 5.069.988.000,00 | 5.069.988.000,00 |
| 1.15    | Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                                       | 0,00           | 2.569.988.000,00 | 1.473.872.000,00 | 4.043.860.000,00 | 4.043.860.000,00 |
| 2.06    | Urusan Pilihan Perdagangan   | 0,00           | 0,00             | 491.500.000,00   | 491.500.000,00   | 491.500.000,00   |
| 2.07    | Urusan Pilihan Perindustrian   | 0,00           | 0,00             | 534.628.000,00   | 534.628.000,00   | 534.628.000,00   |
| 1.19.01 | <b>Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</b>                    | 0,00           | 1.365.262.000,00 | 1.863.000.000,00 | 3.228.262.000,00 | 3.228.262.000,00 |
| 1.19    | Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri                                | 0,00           | 1.365.262.000,00 | 1.863.000.000,00 | 3.228.262.000,00 | 3.228.262.000,00 |
| 1.19.02 | <b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>  | 0,00           | 2.991.085.000,00 | 1.700.000.000,00 | 4.691.085.000,00 | 4.691.085.000,00 |
| 1.19    | Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri                                | 0,00           | 2.991.085.000,00 | 1.700.000.000,00 | 4.691.085.000,00 | 4.691.085.000,00 |
| 1.20.01 | <b>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)</b>                                     | 0,00           | 5.523.044.000,00 | 0,00             | 5.523.044.000,00 | 5.523.044.000,00 |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian | 0,00           | 5.523.044.000,00 | 0,00             | 5.523.044.000,00 | 5.523.044.000,00 |
| 1.20.02 | <b>Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>   | 0,00           | 487.166.000,00   | 0,00             | 487.166.000,00   | 487.166.000,00   |



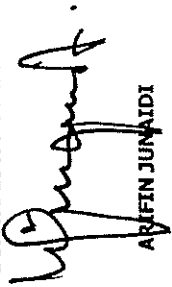
| KODE    | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  | PENDAPATAN         | BELANJA           |                   |                   | JUMLAH BELANJA |
|---------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|         |  |                    | TIDAK LANGSUNG    | LANGSUNG          |                   |                |
|         |  |                    |                   | 4                 | 5                 |                |
| 1       | 2  | 3                  | 4                 | 5                 | 6                 |                |
| 1.20.03 | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 0,00               | 487.166.000,00    | 0,00              | 487.166.000,00    |                |
|         | <b>Sekretariat Daerah</b>  | 500.000.000,00     | 9.550.016.000,00  | 23.137.000.000,00 | 32.687.016.000,00 |                |
| 1.03    | Urusan Wajib Pekerjaan Umum  | 0,00               | 0,00              | 286.635.000,00    | 286.635.000,00    |                |
| 1.06    | Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan   | 0,00               | 0,00              | 493.500.000,00    | 493.500.000,00    |                |
| 1.09    | Urusan Wajib Pertanahan  | 0,00               | 0,00              | 5.467.400.000,00  | 5.467.400.000,00  |                |
| 1.16    | Urusan Wajib Penanaman Modal   | 0,00               | 0,00              | 130.000.000,00    | 130.000.000,00    |                |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 500.000.000,00     | 9.550.016.000,00  | 16.119.425.000,00 | 25.669.441.000,00 |                |
| 1.25    | Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika  | 0,00               | 0,00              | 640.040.000,00    | 640.040.000,00    |                |
| 1.20.04 | <b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>                                    | 0,00               | 2.732.091.000,00  | 11.200.000.000,00 | 13.932.091.000,00 |                |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 0,00               | 2.732.091.000,00  | 11.200.000.000,00 | 13.932.091.000,00 |                |
| 1.20.05 | <b>Inspektorat Kabupaten</b>   | 0,00               | 2.412.840.000,00  | 2.740.000.000,00  | 5.152.840.000,00  |                |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 0,00               | 2.412.840.000,00  | 2.740.000.000,00  | 5.152.840.000,00  |                |
| 1.20.06 | <b>Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>   | 636.231.691.990,00 | 51.507.872.092,00 | 9.876.080.000,00  | 61.383.952.092,00 |                |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 636.231.691.990,00 | 51.507.872.092,00 | 9.876.080.000,00  | 61.383.952.092,00 |                |
| 1.20.07 | <b>Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat</b>   | 0,00               | 2.081.334.000,00  | 4.716.000.000,00  | 6.797.334.000,00  |                |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 0,00               | 2.081.334.000,00  | 4.716.000.000,00  | 6.797.334.000,00  |                |
| 1.20.09 | <b>Pemerintah Kecamatan Sabbang</b>  | 100.000.000,00     | 1.637.493.750,00  | 369.500.000,00    | 2.006.993.750,00  |                |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 100.000.000,00     | 1.637.493.750,00  | 369.500.000,00    | 2.006.993.750,00  |                |
| 1.20.10 | <b>Pemerintah Kecamatan Baebunta</b>   | 15.000.000,00      | 1.827.070.725,00  | 357.500.000,00    | 2.184.570.725,00  |                |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 15.000.000,00      | 1.827.070.725,00  | 357.500.000,00    | 2.184.570.725,00  |                |
| 1.20.11 | <b>Pemerintah Kecamatan Limbong</b>  | 1.350.000,00       | 949.370.500,00    | 317.500.000,00    | 1.266.870.500,00  |                |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 1.350.000,00       | 949.370.500,00    | 317.500.000,00    | 1.266.870.500,00  |                |
| 1.20.12 | <b>Pemerintah Kecamatan Seko</b>   | 1.720.000,00       | 1.033.194.000,00  | 357.500.000,00    | 1.390.694.000,00  |                |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 1.720.000,00       | 1.033.194.000,00  | 357.500.000,00    | 1.390.694.000,00  |                |
| 1.20.13 | <b>Pemerintah Kecamatan Rampi</b>  | 500.000,00         | 608.443.000,00    | 257.500.000,00    | 865.943.000,00    |                |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 500.000,00         | 608.443.000,00    | 257.500.000,00    | 865.943.000,00    |                |
| 1.20.14 | <b>Pemerintah Kecamatan Malangke</b>   | 7.000.000,00       | 1.196.663.500,00  | 307.500.000,00    | 1.504.163.500,00  |                |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 7.000.000,00       | 1.196.663.500,00  | 307.500.000,00    | 1.504.163.500,00  |                |
| 1.20.15 | <b>Pemerintah Kecamatan Malangke Barat</b>   | 11.458.000,00      | 1.069.101.900,00  | 319.500.000,00    | 1.388.601.900,00  |                |
| 1.20    | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 11.458.000,00      | 1.069.101.900,00  | 319.500.000,00    | 1.388.601.900,00  |                |

| KODE    | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  | PENDAPATAN     | BELANJA          |                  |                   |
|---------|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|
|         |  |                | TIDAK LANGSUNG   | LANGSUNG         | JUMLAH BELANJA    |
| 1       | 2  | 3              | 4                | 5                | 6                 |
| 1.20.16 | Pemerintah Kecamatan Masamba   | 156.560.000,00 | 2.791.379.250,00 | 443.500.000,00   | 3.234.879.250,00  |
|         | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 156.560.000,00 | 2.791.379.250,00 | 443.500.000,00   | 3.234.879.250,00  |
| 1.20.17 | Pemerintah Kecamatan Mappedeceng   | 30.000.000,00  | 1.023.644.000,00 | 369.500.000,00   | 1.393.144.000,00  |
|         | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 30.000.000,00  | 1.023.644.000,00 | 369.500.000,00   | 1.393.144.000,00  |
| 1.20.18 | Pemerintah Kecamatan Bone-Bone   | 135.000.000,00 | 1.622.113.500,00 | 369.500.000,00   | 1.991.613.500,00  |
|         | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 135.000.000,00 | 1.622.113.500,00 | 369.500.000,00   | 1.991.613.500,00  |
| 1.20.19 | Pemerintah Kecamatan Sukamaju  | 106.000.000,00 | 1.502.727.200,00 | 375.500.000,00   | 1.878.227.200,00  |
|         | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 106.000.000,00 | 1.502.727.200,00 | 375.500.000,00   | 1.878.227.200,00  |
| 1.20.20 | Pemerintah Kelurahan Kappuna   | 0,00           | 116.600.000,00   | 95.000.000,00    | 211.600.000,00    |
|         | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 0,00           | 116.600.000,00   | 95.000.000,00    | 211.600.000,00    |
| 1.20.21 | Pemerintah Kelurahan Bone  | 0,00           | 108.000.000,00   | 95.000.000,00    | 203.000.000,00    |
|         | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 0,00           | 108.000.000,00   | 95.000.000,00    | 203.000.000,00    |
| 1.20.22 | Pemerintah Kelurahan Kasimbong   | 0,00           | 109.200.000,00   | 95.000.000,00    | 204.200.000,00    |
|         | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 0,00           | 109.200.000,00   | 95.000.000,00    | 204.200.000,00    |
| 1.20.23 | Pemerintah Kelurahan Baliase   | 0,00           | 121.800.000,00   | 95.000.000,00    | 216.800.000,00    |
|         | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 0,00           | 121.800.000,00   | 95.000.000,00    | 216.800.000,00    |
| 1.20.24 | Pemerintah Kelurahan Marobo  | 0,00           | 100.800.000,00   | 100.000.000,00   | 200.800.000,00    |
|         | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 0,00           | 100.800.000,00   | 100.000.000,00   | 200.800.000,00    |
| 1.20.25 | Pemerintah Kelurahan Salassa   | 0,00           | 100.800.000,00   | 100.000.000,00   | 200.800.000,00    |
|         | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 0,00           | 100.800.000,00   | 100.000.000,00   | 200.800.000,00    |
| 1.20.26 | Pemerintah Kelurahan Bone-Bone   | 0,00           | 100.800.000,00   | 115.000.000,00   | 215.800.000,00    |
|         | Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian | 0,00           | 100.800.000,00   | 115.000.000,00   | 215.800.000,00    |
| 1.21.01 | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan                                      | 0,00           | 8.164.714.000,00 | 5.124.000.000,00 | 13.288.714.000,00 |
|         | Urusan Wajib Ketahanan Pangan  | 0,00           | 8.164.714.000,00 | 4.109.793.900,00 | 12.274.507.900,00 |
|         | Urusan Pilihan Pertanian   | 0,00           | 0,00             | 1.014.206.100,00 | 1.014.206.100,00  |
| 1.22.01 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                                  | 0,00           | 1.840.994.000,00 | 2.750.000.000,00 | 4.590.994.000,00  |
|         | Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | 0,00           | 1.840.994.000,00 | 2.750.000.000,00 | 4.590.994.000,00  |
| 1.25.01 | Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata                             | 250.000.000,00 | 2.193.344.000,00 | 3.600.000.000,00 | 5.793.344.000,00  |
|         | Urusan Wajib Kebudayaan  | 0,00           | 0,00             | 1.137.120.000,00 | 1.137.120.000,00  |

| KODE                       | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  | PENDAPATAN         | BELANJA             |                    |                    |
|----------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  |                    | TIDAK LANGSUNG      | LANGSUNG           | JUMLAH BELANJA     |
|                            |  |                    | 4                   | 5                  | 6                  |
| 1                          | 2  | 3                  | 4                   | 5                  | 6                  |
| 1.25                       | Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika  | 250.000.000,00     | 2.193.344.000,00    | 2.125.680.000,00   | 4.319.024.000,00   |
| 2.04                       | Urusan Pilihan Pariwisata  | 0,00               | 0,00                | 337.200.000,00     | 337.200.000,00     |
| 2.01.01                    | <b>Dinas Pertanian</b>   | 126.000.000,00     | 3.914.908.000,00    | 11.914.000.000,00  | 15.828.908.000,00  |
| 1.20                       | Urusan Wajib Otoda, Penth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian | 0,00               | 0,00                | 12.500.000,00      | 12.500.000,00      |
| 1.21                       | Urusan Wajib Ketahanan Pangan  | 0,00               | 0,00                | 1.868.160.000,00   | 1.868.160.000,00   |
| 2.01                       | Urusan Pilihan Pertanian   | 126.000.000,00     | 3.914.908.000,00    | 10.033.340.000,00  | 13.948.248.000,00  |
| 2.02.01                    | <b>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</b>  | 1.400.050.000,00   | 4.347.033.500,00    | 7.100.000.000,00   | 11.447.033.500,00  |
| 1.20                       | Urusan Wajib Otoda, Penth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian | 0,00               | 0,00                | 98.155.000,00      | 98.155.000,00      |
| 2.01                       | Urusan Pilihan Pertanian   | 0,00               | 0,00                | 3.103.600.750,00   | 3.103.600.750,00   |
| 2.02                       | Urusan Pilihan Kehutanan   | 1.400.050.000,00   | 4.347.033.500,00    | 3.898.244.250,00   | 8.245.277.750,00   |
| 2.03.01                    | <b>Dinas Pertambangan dan Energi</b>   | 0,00               | 1.734.362.000,00    | 2.770.000.000,00   | 4.504.362.000,00   |
| 2.03                       | Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral   | 0,00               | 1.734.362.000,00    | 2.770.000.000,00   | 4.504.362.000,00   |
| 2.05.01                    | <b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>  | 20.000.000,00      | 2.370.975.000,00    | 11.055.000.000,00  | 13.425.975.000,00  |
| 2.05                       | Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan  | 20.000.000,00      | 2.370.975.000,00    | 11.055.000.000,00  | 13.425.975.000,00  |
| <b>JUMLAH</b>              |  | 663.933.329.990,00 | 353.034.507.656,00  | 340.175.622.230,00 | 693.210.129.886,00 |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b> |  |                    | (29.276.799.896,00) |                    |                    |

| KODE   | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   | PEMBIAYAAN        |             |                   | SILPA TAB |
|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
|  |   | PENERIMAAN        | PENGELUARAN | PEMBIAYAAN NETTO  |           |
| 1  | 2   | 3                 | 4           | 5                 | 6         |
| 1.20.06  | Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah<br>Urusan Wajib Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian | 29.276.799.896,00 | 0,00        | 29.276.799.896,00 |           |
| 1.20   |   | 29.276.799.896,00 | 0,00        | 29.276.799.896,00 |           |
| <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN</b> |   |                   |             |                   | 0,00      |

MASAMBA, 31 Desember 2011  
**BUPATI LUWU UTARA**

  
**ARIFIN JUNAIDI**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2012

| URUSAN<br>KODE<br>REKENING | URAIAN  | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
|----------------------------|---|--------------------|-------------|
| 1                          | 2   | 3                  | 4           |
| 1.01.1.01.01.00.00.5       | URUSAN Wajib Pendidikan   | 257.861.637.964,00 |             |
| 1.01.1.01.01.00.00.5.1     | Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda                                      | 165.031.637.964,00 |             |
| 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1   | Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda                                      | 165.031.637.964,00 |             |
| 1.01.1.01.01.01.01.5.2     |   | 92.830.000.000,00  |             |
| 1.01.1.01.01.01            |   | 1.428.080.000,00   |             |
| 1.01.1.01.01.01.01         | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | 7.000.000,00       |             |
| 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2   | Penyediaan jasa surat menyurat  | 7.000.000,00       |             |
| 1.01.1.01.01.01.08         | Belanja Barang dan Jasa   | 20.000.000,00      |             |
| 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2   | Penyediaan jasa kebersihan kantor   | 20.000.000,00      |             |
| 1.01.1.01.01.01.12         | Belanja Barang dan Jasa   | 7.500.000,00       |             |
| 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor            | 7.500.000,00       |             |
| 1.01.1.01.01.01.15         | Belanja Barang dan Jasa   | 7.500.000,00       |             |
| 1.01.1.01.01.01.15.5.2.2   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                    | 7.500.000,00       |             |
| 1.01.1.01.01.01.18         | Belanja Barang dan Jasa   | 385.000.000,00     |             |
| 1.01.1.01.01.01.18.5.2.2   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                        | 385.000.000,00     |             |
| 1.01.1.01.01.01.19         | Belanja Barang dan Jasa   | 1.001.080.000,00   |             |
| 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1   | Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Kelatasausahaan dan Asset | 635.460.000,00     |             |
| 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2   | Belanja Pegawai   | 365.620.000,00     |             |
| 1.01.1.01.01.02            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                           | 68.675.250,00      |             |
| 1.01.1.01.01.02.16         | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 36.025.250,00      |             |
| 1.01.1.01.01.02.16.5.2.3   | Belanja Modal   | 36.025.250,00      |             |
| 1.01.1.01.01.02.22         | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                    | 7.000.000,00       |             |
| 1.01.1.01.01.02.22.5.2.2   | Belanja Barang dan Jasa   | 7.000.000,00       |             |
| 1.01.1.01.01.02.24         | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                      | 10.000.000,00      |             |